

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA

MUTIA ANJASMARA
NIM. 82338240019

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam praktiknya, saksi dan korban sering berada dalam posisi yang rentan terhadap ancaman, tekanan, maupun intimidasi, sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, negara membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi yang bertugas memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Namun demikian, meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang cukup jelas, pelaksanaan perlindungan oleh LPSK dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis maupun kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, pelaksanaan peran LPSK, serta kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai peran LPSK telah cukup komprehensif dan mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, namun masih terdapat kelemahan dalam hal harmonisasi peraturan dan penguatan kewenangan lembaga. Dalam praktiknya, LPSK telah menjalankan perannya melalui berbagai bentuk perlindungan, baik perlindungan fisik, hukum, maupun pemulihan korban, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan kewenangan, koordinasi antar lembaga yang belum efektif, serta keterbatasan sumber daya. Selain itu, terdapat kendala yuridis berupa belum kuatnya kewenangan eksekutorial LPSK dan belum optimalnya mekanisme pemenuhan hak korban, serta kendala kelembagaan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan jangkauan layanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat berjalan secara efektif, komprehensif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: LPSK, perlindungan hukum, saksi dan korban, sistem peradilan pidana, hak asasi manusia;

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY IN PROVIDING LEGAL PROTECTION FOR WITNESSES AND VICTIMS OF CRIMINAL ACTS

MUTIA ANJASMARA
NIM. 82338240019

Legal protection for witnesses and victims of crime is a crucial part of realizing a just and human rights-oriented criminal justice system. In practice, witnesses and victims are often vulnerable to threats, pressure, and intimidation, which can hinder the law enforcement process. To address this issue, the state established the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as an institution tasked with providing protection and fulfilling the rights of witnesses and victims. However, despite the existence of fairly clear legal regulations, the implementation of protection by the LPSK in practice still faces various obstacles, both from a legal and institutional perspective. Therefore, this study aims to analyze the legal regulations, the implementation of the LPSK's role, and the obstacles faced in providing legal protection for witnesses and victims of crime in Indonesia.

The research method used in this study is a normative juridical legal research method with analytical descriptive specifications. This study employed several legal research approaches, namely the statute approach, the case approach, and the conceptual approach.

The results indicate that normatively, the legal regulations regarding the role of the LPSK (Lembaga Penitentiary and Victim Protection Agency) are quite comprehensive and reflect the principles of human rights protection. However, weaknesses remain in terms of regulatory harmonization and strengthening the institution's authority. In practice, the LPSK has carried out its role through various forms of protection, including physical protection, legal protection, and victim recovery. However, its implementation has not been optimal due to limited authority, ineffective inter-agency coordination, and limited resources. Furthermore, legal obstacles exist in the form of the LPSK's weak executive authority and suboptimal mechanisms for fulfilling victims' rights, as well as institutional constraints such as limited budget, human resources, and service coverage. Therefore, strengthening efforts are needed through regulatory refinements, institutional capacity building, and enhanced coordination and public outreach to ensure effective, comprehensive, and equitable legal protection for witnesses and victims.

Keywords: LPSK, legal protection, witnesses and victims, criminal justice system, human rights;;